# BAB 1

**PENDAHULUAN**

## Latar Belakang Masalah

Jepang adalah salah satu negara yang telah melalui sejarah yang cukup panjang. Ketenaran Jepang di dunia berawal sejak keterlibatan Jepang itu sendiri pada Perang Dunia II. Jepang juga merupakan negara yang kuat semassa pertempuran tersebut. Dan wilayah Hindia–Belanda mampu Jepang kuasai pada sekitar tahun 1942.[[1]](#footnote-1)

Jepang sendiri sempat menjadi penguasa di Indonesia dan mampu mengalahkan pihak Hindia-Belanda yang secara resmi sejak 1942 sampai 17 Agustus 1945. Dengan masuknya penjajahan Jepang di Indonesia tentunya terdapat dampak negatif yang ditimbulkan, tetapi selain itu terdapat pula dampak positif diantaranya masyrakat pada saat itu mampu berkomunikasi dengan bahasa Melayu yang kemudian berkembang menjadi Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi nasional, pendirian sekolah dasar, menengah sampai atas, kemudian pembentukan strata di masyarakat dari paling bawah atau disebut juga dengan Rukun Tetangga (*Tonarigumi*) dan lain sebagainya.

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, periode kolonialisasi Jepang di Indonesia sendiri akhirnya berakhir. Negara Jepang pun telah merubah *image* mereka yang terkenal sebagai penakluk (negara penjajah) menjadi negara yang senang berdamai dan membantu, pasca bom nuklir Nagasaki dan Hiroshima pada 1945.

Hubungan Indonesia dan Jepang telah berhasil terjalin secara harmonis. Kontak sosial-ekonomi dari keduanya kali pertama adalah pada pembangunan industri elektronik di Indonesia yang bekerjasama dengan Jepang, dibarengi dengan masuknya gelombang migrasi Jepang ke Indonesia.

Menurut Dennis Yasutomo bantuan luar negeri dari Jepang terhadap negara-negara di dunia berhubungan dengan konsep, doktrin dan teori selain kebijakan dan ketentuan dari politik luar negeri Jepang itu sendiri.[[2]](#footnote-2) Penetrasi yang dilakukan Jepang di lingkup Internasional sering kali dihubungkan dengan isu-isu politik keamanan.

Pada tahun 1965 Indonesia yang mendapatkan bantuan luar negeri Jepang berada pada posisi perkembangan secara signifikan. Jepang adalah negara Asia dengan peringkat pertama serta mendapat peringkat di dunia ke dua dalam hal bantuan luar negeri, pada saat itu. Terkait bantuan luar negeri dari Jepang yang Indonesia peroleh, dengan total hampir 231 juta US Dollar dengan rincian 63 juta US Dollar bantuan dengan jangka pendek serta 168 juta US Dollar bantuan jangka menengah dan panjang. Berbeda sedikit dengan Uni Seviot dengan jumlah bantuan 990 juta US Dollar, jumlah yang sangat besar.[[3]](#footnote-3)

Bantuan luar negeri yang Indonesia peroleh dari Jepang sampai sekitar tahun 1970-an berasal dari lima pencapaian kebijakan dari kerjasama ekonomi (*economic cooperation policy*) Jepang, terdiri dari:[[4]](#footnote-4)

1. Mempromosikan ekspor, mengamankan suplai bahan baku dan membangun iklim aktifitas bisnis yang kondusif.
2. Mendukung penyelenggaraan hubungan diplomasi yang efektif antara Jepang dan negara-negara Asia lainnya.
3. Memperbaiki stabilitas politik, ekonomi dan sosial melalui bantuan luar negeri Jepang yang memiliki makna penting bagi keamanan sosial dan politik.
4. Mendemonstrasikan itikad baik Jepang sebagai alternatif bantuan luar negeri negara-negara Barat.
5. Menyelenggarakan pengaruh (hegemoni) dalam konteks hubungan luar negeri, baik regional ataupun internasional.

Awal abad ke-20 Jepang berkembang menjadi salah satu negara termaju di dunia. Pencapaian Jepang melalui beberapa bidang, diantaranya jasa, perindustrian, pertanian dan perikanan yang menjadikan negara ini sebagai terbesar ketiga sebagai negara potensial bagi pasar bebas, setelah Amerika Seikat dan Tiongkok.[[5]](#footnote-5)

Bantuan luar negeri Jepang disebut ODA (*Official Development Assistance*). Tahun 1980 ODA telah menduduki peringkat pertama di dunia sebagai bantuan luar negeri terbesar. Biasanya ODA pertahun sekitar 0,32 dari total GNP (*Gross National Product*) Jepang.[[6]](#footnote-6) ODA Jepang tidak semata-mata lepas dari aspek historis dimana bantuan-bantuan luar negeri besar ini ditujukan sebagai bentuk kompensasi negara-negara yang telah rusak akibat invasi yang dilakukan Jepang di era Perang Dunia II. Pendonoran bantuan luar negeri Jepang yang dibagi dalam persenan adalah sebagai berikut, untuk negara-negara Asia 59 %, Afrika 11 %, Timur-Tengah 10%, dan Amerika Latin 8%. [[7]](#footnote-7)

Pada dekade ini jalinan hubungan antara Jepang dan Indonesia telah berjalan dengan baik. Kerjasama yang telah dilakukan bukan hanya kerjasama ekonomi saja, namun bidang-bidang lainnya seperti aspek sosial-kemanusiaan. Tetapi, dengan fakta bahwa wujud dari hubungan Indonesia-Jepang mulai tidak berimbang dengan perbandingan bahwa Jepang lebih mendominasi dibandingkan Indonesia dalam kerjasama tersebut. Secara teknis maupun dengan anggaran Jepang tentu lebih unggul.

Kementerian luar negeri Jepang (MOFA, *Minister of Foreign Affairs*) di bulan Juni 2008 di Tokyo telah mempublikasikan laporan yang menyatakan, bantuan luar negeri Jepang sempat mengalami paradigma yang signifikan, tergambar pada tiga aspek, yaitu:[[8]](#footnote-8)

1. Aspek pemanfaatan, dimana bantuan luar negeri haruslah dapat memberikan manfaat yang besar untuk negara-negara berkembang.
2. Aspek pelepasan dari perubahan kontradiksi politik internasional.
3. Aspek pemanfaatan peran swasta Jepang dan organisasi donor (JICA) sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah Jepang.

Indonesia merupakan negara peringkat pertama yang menerima ODA Jepang, kemudian disusul oleh Tiongkok, Thailand, Filipina dan Bangladesh. ODA Jepang difasilitasi oleh lembaga terkait, diantaranya JEXIM (*Japan Export-Import Bank*), OECF (*Overseas Economic Cooperation Fund*) dan JICA (*Japan International Cooperation Agency*).

JICA yang merupakan salah satu lembaga terkait, dalam proses pembentukan JICA itu sendiri rupanya tidak lepas dari peranan pemerintah Jepang guna mengurangi friksi, pertentangan ataupun ketegangan dengan negara-negara penerima bantuan ODA Jepang. John White memaparkan dalam “The Politic of Foreign Aid” bahwa dalam struktur bantuan luar negeri Jepang biasa saja. Dengan adanya pengaruh politik juga sejarah di massa lalu membuat negara-negara donor menjadi sangat hati-hati terhadap negara-negara penerima bantuan, agar itikad baik mereka tak mengalami pertentangan dan kepentingan nasional negara pendonor dapat tercapai. [[9]](#footnote-9)

Pada periode 2005-2010 keberadaan JICA (Japan International Coopration Agecy) berperan penting sebagai secondhand agen kerjasama internasional pemerintah Jepang. JICA memiliki kantor cabang lebih dari 64 negara perwakilan dunia, salah satunya Indonesia.

Indonesia berperan penting terhadap dinamika kebijakan luar negeri bagi Jepang. Pada era kepemimpinan Shigeru Yoshida perdana menteri Jepang, Indonesia termasuk kedalam prioritas bantuan luar negeri Jepang, sebab Jepang ingin membangun negara-negara yang pernah dijajahnya.[[10]](#footnote-10)

Pernyataan dari Shigeru Yoshida pada Juli 1951 adalah beberapa tahun setelah kalahnya Jepang pada Perang Dunia II. Pernyataan tersebut dijadikan tolak ukur bahwa Jepang akan mewujudkan tanggung-jawabnya sebagai negara yang pernah berkuasa. Tentunya hal ini berlaku juga untuk Indonesia, karena Indonesia sendiri merasakan kerugian atas tindakan penjajahan Jepang di massa lalu. Maka hal ini yang mendasari adanya ODA di Indonesia.

JICA merupakan salah satu lembaga kerjasama Jepang yang memiliki peran dalam proses pembangunan infrastruktur di Indonesia. Orgnisasi tersebut dibentuk pada 1 Oktober 2003 dan pembentukannya sendiri tak terlepas dari Badan Tindakan pada tahun 2002. Badan Tindakan tersebut sudah ada sejak 1974 di bawah yuridiksi dari Departemen Luar Negeri Jepang.[[11]](#footnote-11)

Pada 2008 JICA menjalankan marger bersama Bank Jepang yang bertujuan memberi bantuan-bantuan kepada negara-negara yang tengah berkembang.[[12]](#footnote-12) Dan pada bulan Oktober ditahun yang sama JICA menjadi salah satu lembaga pembangunan terbesar di dunia. Organisasi tersebut memiliki anggaran besar, 1 triliun Yen atau setara dengan 8,5 US Dollar. Cakupan proyek JICA juga luas, proyek tersebut berada di lebih dari 150 negara di dunia. Kerjasama tersebut didukung pula oleh sukarelawan Jepang dengan kerjasama luar negeri dan pemuda yang Nikkei.[[13]](#footnote-13)

Sejarah JICA di Indonesia dimulai tahun 1954, saat dimulainya program pelatihan di Jepang. Hal ini kemudian ditindaklanjut i dengan dimulainya penugasan tenaga ahli di Indonesia oleh pemerintah Jepang pada tahun 1957. Realisasi ODA pertama kali sebagai cika bakal JICA di Indonesia terealisasi pada tahun 1961 melalui pembentukan Dana Kerjasama Ekonomi Luar Negeri (OECF/ Overseas Economic Cooperation Fund) yang dimulai dengan pinjaman swasta luar negeri Jepang terhadap Indonesia.[[14]](#footnote-14)

Sebagai organisasi pendukung pembangunan infrastruktur, JICA telah banyak memberikan kontribusi-kontribusi berupa bantuan teknis dan peminjaman dana. Seperti dalam proyek MRT Jakarta misalnya. JICA telah merekomendasikan serta berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta dan membuat mekanisme dalam proses pembangunan dan penyelesaian proyek MRT. Proyek Mass Rapid Transit (MRT) ini ditaksir akan menghabiskan anggaran yang besar, jumlahnya mencapai 144 milyar Yen pada pembangunan awal.[[15]](#footnote-15) Dana tersebut diperoleh dengan pinjaman sebasar 125.237.000.000 Yen dan sisanya akan menggunakan dana APBD DKI Jakarta.

Proyek MRT ini sejak awal tahun 2013 hingga menjelang akhir tahun sudah menjadi perbincangan hangat, pro dan kontra yang terjadi tersebut membuatnya semakin banyak dibicarakan. Pengamat-pengamat dan sebagian masyarakat yang awam berasumsi bahwa progam tersebut ditakutkan tidak akan terealisasi seperti proyek pada rezim sebelumnya, proyek monorel misalnya.

Disisi lain proses pembangunan MRT ini mendesak dan harus segera dilakukan mengingat tingkat kepadatan penduduk di Jakarta yang terus meningkat. Dimulai pada tingkat mobilitas migrasi yang semakin tinggi pula. Sedangkan ditingkat pembangunan jalan raya sebagai sarana untuk lalu lintas nyaris tak ada perkembangan. Dari data Dinas Perhubungan DKI Jakarta pertumbuhan jalan di Jakarta kurang dari 1% jika dibandingkan dengan pertumbuhan kendaraan bermotor yang 1000 kali lipat setiap harinya.[[16]](#footnote-16)

Ketakutan dari pemerintah Jakarta sendiri akan kemungkinan kemacetan permanen ditanggapi secara serius, mengingat bahwa Jakarta merupakan Ibukota Indonesia juga sebagai pusat dari perekonomian Indonesia. Pertumbuhan kendaraan bermotor tersebut diperkirakan akan macet total pada 2020 menurut SITRAMP II (Study on Integrated Transportation Master Plan) akibat kendaraan bermotor yang memadati jalan-jalan ibukota. Rata-rata orang menghabiskan total waktunya selama 2 bulan di jalan dan 12,8 triliun pertahun dengan akumulasi waktu, biaya dan bahan bakar. SITRAMP II menghimbau agar dilakukan perbaikan dalam sarana transportasi bila di tahun 2020 tidak mau mengalami kemacetan total.[[17]](#footnote-17)

Pembangunan MRT Jakarta diharapkan akan menjadi salah satu solusi untuk kemacetan di Indonesia. Selain itu sarana umum yang merupakan idola sebagian masyarakat adalah kereta.[[18]](#footnote-18) Kereta yang memiliki trek dan aturan sendiri menjadikan sarana yang memiliki nilai edukasi, ini tentunya lebih baik jika dibandingkan dengan angkutan umum lainnya yang cenderung tidak teratur bahkan berbahaya.[[19]](#footnote-19)

Secara resmi kerjasama yang terlajin antara JICA dan pemprov DKI Jakarta mengenai pinjaman anggaran untuk proyek MRT terjalin pada 31 maret 2009. Saat ini proyek MRT Jakarta masih berlangsung (on going), proyek tersebut resmi dibangun pada 2013 dan diperkirakan akan selesai pada akhir 2018 serta ditargetkan awal 2019 sudah bisa dioperasikan. Proyek pembangunan MRT di Jakarta juga sebagai bagian dari serangkai peranan JICA dalam mendukung proses pembangunan infratruktur di Indonesia. Langkah tersebut tentunya dijalankan dengan penuh pertimbangan baik secara makro politik yang melibatkan berbagai aktor, diantaranya pemerintah Indonesia beserta stakeholder lainnya, JICA dan pemerintah Jepang itu sendiri. Inilah yang akan menjadi kajian yang kemudian menjadi objek lebih lanjut dari penelitian.

## Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Permasalahan, peneliti menyusun identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak dari dalam pembangunan proyek MRT Jakarta yang disokong oleh JICA?
2. Bagaimana prospek pemberian bantuan dana JICA dalam proyek MRT Jakarta?
3. Bagaimana aktor-aktor dalam negeri Indonesia mengimplementasikan bantuan dari JICA dalam proyek MRT?

### Pembatasan Masalah

Untuk memudahkan dalam menganalisa permasalahan diatas dan melihat begitu kompleksnya masalah penelitian, maka penulis melakukan pembatasan masalah dengan menitik beratkan pada, peranan dari JICA dalam proyek MRT Jakarta serta dalam bentuk apa saja bantuan yang diberikan JICA dalam proyek tersebut.

### Rumusan Masalah

Adapun perumusan dari masalah ini adalah untuk mencari bagaimana peranan JICA dalam proyek MRT Jakarta, siapa sajakah aktor-aktor yang terlibat serta mengapa bisa munculnya gagasan pembangunan MRT Jakarta, dan apakah pembangunan proyek MRT ini bisa mengatasi promatika kemacetan ibu kota. Selain itu akan dibahas juga sekilas mengenangi sejarah JICA dan apa itu MRT (*Mass Rapid Transit*).

## Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

### Tujuan Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini penulis mempunyai beberapa tujuan yang sangat penting yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan dampak dari peranan JICA dalam pembangunan proyek MRT Jakarta.
2. Untuk mengetahui bagaimana prospek pemberian bantuan dana JICA dalam proyek MRT Jakarta
3. Untuk mengetahui siapa saja aktor-aktor dalam negeri yang turut mengimplementasikan pinjaman dana dari JICA untuk proyek MRT

### Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua elemen masyarakat serta orang-orang yang memiliki kepentingan ataupun yang berminat pada permasalahan yang diteliti oleh penulis sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi. Secara khususnya penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai kegunaan akademik. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan informasi bagi para mahasiswa Hubungan Internasional khususnya pemerhati masalah-masalah internasional pada umumnya mengenai peranan suatu IGOdi beberapa negara.

## Kerangka Teoritis Dan Hipotesis

### Kerangka Teori

Dalam upaya menjawab pokok-pokok permasalahan serta menarik hipotesa, maka penulis dalam karya penelitian ini akan didukung oleh beberapa pendekatan-pendekatan, konsep dan teori yang relevan dengan tema bahasan penelitian ini.

Kerjasama yang dilakukan antara Jepang dan Indonesia melalui JICA menandakan adanya hubungan bilateral antar kedua negara tersebut. Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, hubungan bilateral adalah hubungan kerjasama yang terjadi antara dua negara di dunia ini pada dasarnya tidak terlepas dari kepentingan nasional masing-masing negara. Kepentingan nasional merupakan unsur yang sangat vital yang mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Salah satu karakter politik global yang paling penting pada awal abad kedua puluh ini adalah semakin menjamurnya organisasi internasional di penjuru dunia. Organisasi internasional didefinisikan sebagai pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang lengkap dan jelas serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama.[[20]](#footnote-20)

Cheever dan Haviland mendefinisikan organisasi internasional secara sederhana sebagai:

**“Any cooperative arrangement instituted among state, usually by a basic agreement, to perform some mutually advantageous functions implemented trough periodic meetings and staff activities”[[21]](#footnote-21)**

Organisasi internasional digambarkan sebagai pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara-negara, umumnya berdasarkan atas status persetujuan dasar, untuk melaksanakan fungi-fungsi yang memberi manfaat timbal balik yang diejawantahkan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staff secara berkala.

Pembentukan, tujuan dan kelangsungan hidup organisasi-organisasi internasional bergantung pada negara. Organisasi internasional secara umum dibedakan atas dua bentuk, yaitu sebagai berikut :

1. Organisasi internasional antar pemerintah (inter governmental organization) yang sering lazim disingkat menjadi IGO. Anggotanya adalah pemerintah atau wakil istansi yang mewakili pemerintahan suatu negara secara resmi. Kegiatan administrasinya diatur berlandaskan hukum publik.
2. Organisasi internasional non-pemerintah (non governmental organization) yang sering juga lazim disingkat dengan peristilahan NGO atau INGO (international non governmental organization). Kegiatan administrasinya biasanya diatur berlandaskan pada hukum perdata. [[22]](#footnote-22)

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menggolongkan JICA sebagai salah satu bentuk IGO (inter-governmental organization), karena merupakan suatu organisasi perwakilan dan menjadi perpanjangan kepentingan nasional pemerintah Jepang dalam memberikan bantuan bagi negara-negara berkembang di seluruh dunia berdasarkan hubungan bilateral yang dijalin, termasuk Indonesia.[[23]](#footnote-23)

Pendekatan utama dalam menjembatani efektifitas peran dari JICA dalam mendukung pembangunan infrastruktur Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta adalah teori peran organisasi dalam pendekatan sosial-ekonomi. Teori ini menekankan pada adanya konseptualisasi kerjasama yang terbentuk atas dua elemen yang tidak berimbang (in-balance role cooperation), artinya meskipun ada sebuah mekanisme tawar-menawar maka ini di kondisikan pada salah satu kekuatan yang relatif lemah atau dianggap lemah.[[24]](#footnote-24)

. Ketika membahas mengenai kerjasama, baik itu bilateral maupun multilateral, maka tidak hanya unsur ekonomi saja yang berperan di dalamnya, tetapi juga unsur politik seperti kekuasaan. Begitu pula dengan hubungan internasional pada masa kini dimana tidak semata-mata berbicara mengenai penyelesaian masalah-masalah dunia yang hanya berkaitan dengan konflik dan kesiagaan militer saja, namun juga telah melibatkan dimensi ekonomi dalam proses pelaksanaan hubungan antar aktor internasional. Pada saat ini pula, politik dunia tidak bisa di pahami lagi hanya sebatas melalui satu perpekstif saja, studi hubungan internasional tidak cukup bila hanya membahas soal politik tanpa mempelajari ekonomi. Maka dari itu, dikarenakan keterkaitanantara ekonomi (kesejahteraan) dan politik (kekuasaan) inilah sehingga dikenal dalam hubungan internasional sebagai ekonomi politik internasional.

Ekonomi Politik Internasional (EPI) menurut Mochtar Mas’oed didefinisikan sebagai studi tentang saling hubungan antara ekonomi dan politik dalam arena internasional.[[25]](#footnote-25) Salah satu jenis dari pelaksanaan ekonomi politik internasional yaitu pemberian bantuan asing.

Bantuan asing digunakan aktor-aktor internasional dalam melakukan kerjasama. Secara umum, Holsti mendefinisikan bantuan asing sebagai pemindahan dana, barang, atau nasehat teknis dari satu negara donor kepada negara penerima yang merupakan sarana kebijakan yang telah digunakan dalam hubungan luar negeri. Hanya negara-negara besar yang dapat menggunakan bantuan asing sebagai sarana kebijaksanaan yang efektif untuk menopang diplomasi mereka, dan hal inipun tidak menyalurkan bantuan dalam jumlah besar kepada semua negara yang masih kurang maju.

Lebih lanjut, Holsti membagi empat macam tipe utama bantuan asing, yaitu:

**1.** Bantuan Militer;

2. Bantuan Teknik;

3. Grants (Hibah Dan Program Impor Komoditi);

4. Pinjaman Pembangunan. [[26]](#footnote-26)

Dalam *setting* seperti ini, bantuan internasional/bantuan luar negeri (*foreign aid*) praktis hanya menjadi sebuah alat kebijakan untuk mencapai kepentingan nasional. Alat kebijakan ini dalam pandangan realis dilihat sebagai sebuah hasil dari perang yang digunakan dalam kompetisi diantara kekuatan *great power*. Bantuan internasional di pandang sebagai sebuah senjata kunci dalam Perang Dingin untuk memperbesar kemungkinan beraliansinya negara-negara dunia ketiga kedalam salah satu kubu *great power*. Motivasi politik itulah yang menurut Morghentau menjadi hal yang di pertimbangkan oleh donor saat memberikan bantuan luar negeri.[[27]](#footnote-27)

Dalam konteks pembangunan ekonomi, bantuan internasional seringkali kurang sukses. Namun bagi para pendukungnya kesuksesan bantuan internasional tidak hanya berdasarkan pada hal-hal yang secara tegas berhubungan dengan ekonomi, namun lebih kepada prakondisi intelektual, moral dan politik yang secara langsung tidak berhubungan dengan manupulasi ekonomi, jikapun berhubungan hanya pada bagian kulit manipulasi ekonominya saja. Hal penting yang coba di katakan oleh realis adalah bagaimana pengaruh praktek bantuan internasional terhadap penipisan konsep kedaulatan.[[28]](#footnote-28)

Bantuan luar negeri akan tetap menjadi masalah yang mengundang pro kotra apabila hanya bergerak pada ranah teknis/ekonomi dalam prakteknya. Yang di butuhkan adalah integrasi dari foreign aid ke dalam kebijakan negara penerima bantuan (recipient country) dan dalam waktu yang sama di jaga oleh kondisi politik. Di luar itu, kebijakan bantuan luar negeri tidak ada bedanya dengan dengan kebijakan diplomatik atau propaganda. Semuanya adalah senjata politik bagi sebuah negara.[[29]](#footnote-29)

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa JICA bertugas untuk memperkuat SDM, transfer teknologi dan pembangunan infrastruktur di negara-negara penerima bantuan. Tipe bantuan yang diberikan baik melalui kerjasama teknis, pinjaman maupun hibah disesuaikan dengan kepentingan masing-masing negara.

Adapun motif pelaksanaan pemberian bantuan luar negeri adalah tidak terlepas juga dari motivasi para pemberi bantuan asing (negara donor). Terdapat 4 motivasi negara donor, yaitu:

1. Motif kemanusiaan, yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di negara dunia ketiga melalui dukungan kerjasama ekonomi.

2. Motif politik, yang memusatkan tujuan untuk meningkatkan image negara donor. Peraihan pujian menjadi tujuan dari pemberian bantuan luar negeri baik dari politik domestic dan hubungan luar negeri donor.

3. Motif keamanan nasional, yang mendasarkan pada asumsi bahwa bantuan luar negeri dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang akan mendorong stabilitas politik dan akan memberikan keuntungan pada kepentingan negara donor. Dengan kata lain, motif keamanan memiliki sisi ekonomi.

4. Motif yang berkaitan dengan kepentingan nasional negara donor. [[30]](#footnote-30)

Bantuan asing umumnya tidak ditujukan untuk kepentingan politik jangka pendek melainkan untuk prinsip-prinsip kemanusiaan atau pembangunan ekonomi jangka panjang. Dalam jangka panjang bantuan asing dimaksudkan untuk membantu menjamin beberapa tujuan politik negara donor yang tidak dapat dicapai hanya melalui diplomasi, propaganda atau kebijakan publik semata. Akan tetapi, pada umumnya negara donor mengatasnamakan motivasi moral, kemanusiaan dan perdamaian dunia dalam melaksanakan misinya.

Preposisi yang telah diungkapkan di atas menyebabkan alokasi ODA tentunya tidak hanya menekankan pada partisipasi salah satu pihak saja, namun juga negara donor. Inilah yang nantinya akan menjadi pertimbangan negara donor tentang apa yang seharusnya diberikan, apakah bantuan teknis, bantuan kredit lunak ataupun hibah. Ini sekaligus menunjukkan bahwa implementasi ODA tidak lepas dari pilihan rasional (rational choice) dan adanya sikap politik (political will).

Thomas Oatley menyatakan bahwa pilihan rasional suatu negara atau organisasi dalam mengimplementasikan ODA ternyata diwujudkan dengan terlebih dulu tahu bagaimana interaksi yang terjadi antara kelompok-kelompok kepentingan dan institusi-institusi politik yang terlibat didalamnya. Untuk itu kita perlu memahami dua aspek politik yang terkait, pertama, kita perlu memahami dimana letak kepentingan atau preferensi kelompok kepentingan tersebut berasal dan yang kedua, kita butuh untuk melihat lebih jauh bagaimana institusi politik mengagregasi, merekonsiliasi dan merubah berbagai kepentingan yang saling bersaing dalam kebijakan tersebut.[[31]](#footnote-31)

Preposisi yang dikemukakan oleh Otaley di atas merupakan bagian dari dinamika ekonomi politik terkini. Dengan demikian munculnya lembaga-lembaga bantuan luar negeri merupakan konsekuensi atas munculnya persoalan negara-negara dunia ketiga yang kekurangan sumber daya pembangunan, sedangkan negara-negara baju telah over suplay dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya, namun tentunya tidak ada yang cuma-cuma dalam dinamika ekonomi-politik internasional.

Pada pendekatan/konsep selanjutnya yang dikemukakanoleh John E Carroll bahwa terdapat keterkaitan (interdependensi) antara kepentingan negara berkembang dengan kapasitas peran bantuan luar negeri negara-negara adikuasa. Bagaimanapun juga kekuatan negara industri memiliki beberapa bagian yang relatif rapuh, sehingga dominasinya pada kelompok negara berkembang memiliki relevansi untuk mewujudkan kepentingan pada jangka panjang.

Kepentingan/motivasi sebagai tendensi negara-negara industri maju terhadap kelompok negara dunia ketiga umumnya berkaitan dengan tiga hal, yaitu: [[32]](#footnote-32)

1. Diwujudkan dalam pembangunan infrastrktur.
2. Diwujudkan dalam pembangunan bantuan kemanusiaan.
3. Diwujudkan dalam pembangunan program bantuan kredit lunak jangka panjang.

Dengan demikian maka dapat diketahui dalam dinamika ekonomi-politik internasional terkini sangat sulit untuk melepaskan dinamika ekonomi dengan politik. Artinya selalu ada tendesi atau kepentingan praktis baik secara langsung atau secara terselubung yang sebenarnya tidak terintegrasi dengan kegiatan ekonomi antar negara. Pada akhirnya ini akan menyebabkan kondisi ketergantungan yang begitu besar oleh negara berkembang atas negara maju dan ini akan menyulitkan realisasi tahapan-tahapan selanjutnya karena negara berkembang semakin sulit dalam memperoleh pilihan ataupun melepaskan diri dari dominasidominasi pembuatan keputusan.

Implementasi ODA ternyata juga berhubungan dengan munculnya kelompok-kelompok kepentingan (interest group). Mancur Olson menyebutkan bahwa jika diasumsikan bahwa setiap individu atau kelompok kepentingan berupaya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari upaya yang sekecil-kecilnya dari sebuah kegiatan perekonomian, maka secara logis seluruh sumber daya akan dikerahkan untuk mencapai tujuan itu, termasuk dalam kegiatan lobby. Pada titik itu, Olson mempertanyatakan bagaimana jika efek proses lobby itu berlangsung secara kolosal, sehingga mengakibatkan proses pengambilan keputusan berjalan sangat lambat dan ekonomi pada akhirnya tidak bisa merespon dengan cepat perubahan dan teknologi baru.[[33]](#footnote-33)

Berdasar pada teori ODA di atas maka dapat dielaborasikan bahwa implementasi bantuan luar negeri yang digulirkan oleh JICA ternyata tidak lepas dari perpanjangan dari pemerintah Jepang. Jika dikaitkan dengan preposisi yang dikemukakan Mancur Olson maka sebenarnya posisi JICA tidak lepas dari faktor organization setting, dimana organisasi ini dibentuk sebagai organisasi penghubung atau organisasi mediasi, antara negara penerima donor dengan pemerintah Jepang.

Salah satu bentuk kerangka kerja JICA dalam implementasi ODA adalah modalitas bantuan utama, bantuan teknis, termasuk hibah dan pinjaman. Beberapa bentuk yang termasuk di dalamnya, yaitu kapasitas dan pengembangan kelembagaan, serta studi kelayakan dan rencana induk. Kasus ini secara implisit menunjukkan bahwa JICA posisi begitu mendominasi dalam implementasi ODA. Sehingga dapat diasumsikan bahwa bagaimana bantuan itu terealisasi, maka JICA-lah yang memiliki peranan yang dominan.

Dengan demikian melalui paparan teori dan aplikasi kasus di atas maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan program-program bantuan lua negeri (ODA) yang terbagi atas bantuan anggaran dan teknis yang memposisikan JICA sebagai perpanjangan tangan (second hand) dari pemerintah Jepang, serta sebagai konselor pemerintah Indonesia dalam bidang pembangunan infrastruktur. Artinya implementasi dari peran JICA yang berbentuk bantuan teknis, anggaran ataupun hibah (grant) memiliki karakter masing-masing pada penerapan pembangunan infrastruktur, dimana posisi JICA menjadi begitu penting bukan hanya bagi pemerintah Jepang, namun juga Indonesia.

Pada kasus pembangunan MRT Jakarta dijalankan melalui koordinasi terpadu dengan para stakeholder daerah dan pusat di Indonesia baikpada tahapan survey, investigasi, desain, konstruksi, operasional dan pemeliharaan (maintenance). Hal ini didasarkan pada fakta bahwa meskipun karakteristik pembangunan infrastruktur ini hampir sama, namun secara non-teknis, misalnya aspek sosial-kultural, political will para stakeholder daerah dan lain-lainnya akan turut juga memberikan pengaruh.

### Hipotesis

Berdasarkan pada perumusan masalah, kerangka teori dan asumsi yang di kemukakan diatas yang merupakan suatu landasan berfikir, maka penulis dapat menarik suatu hipotesis sebagai berikut:

**“Apabila JICA menjalankan programnya berupa, memberi pinjaman dana pembangunan proyek MRT Jakarta maka proyek pembangunan MRT Jakarta dapat teralisasi dan berdampak teruainya kemacetan Ibukota Indonesia, Jakarta”.**

### Operasionalisasi Variabel Dan Indikator

**TABEL I**

**Tabel operasional dan indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel Dalam Hipotesis** | **Indikator (Empirik)** | **Verifikasi (Analisis)** |
| **Variabel bebas:** Jika JICA dapat menjalankan programnya berupa, memberi pinjaman dana pembangunan proyek MRT dan memberikan bantuan secara teknis | * Adanya komitmen JICA dan Pemprov DKI Jakarta dalam penyelesaian proyek MRT Jakarta.
 | Data (**fakta**) Adanya kerjasama yang terlajin antara JICA dan pemprov DKI Jakarta tentang pinjaman anggara untuk proyek MRT pada 31 maret 2009 |
| * Proyek MRT ini ditaksir akan menghabiskan anggaran yang besar, jumlahnya mencapai 144 milyar Yen pada pembangunan awal.
 | Data (**fakta**) JICA telah meberikan pinjaman dana sebesar 120 milyar Yen untuk MRT pada pembangunan tahap 1. |
| **Variabel terikat :**maka proyek pembangunan MRT akan teralisasi dan akan mengurai kemacetan di Ibukota | * Proyek MRT Jakarta diharapkan mampu membantu mengurai kemacetan di ibukota.
 | Data (**fakta**) kota Jakarta yang merupakan ibukota Indonesia memiliki tingkat mobilas migrasi yang sangat tinggi. |

### Skema Karangka Teoritis

Pembangunan Proyek *Mass Rapid Transit* (MRT) Jakarta

PREMPROV

DKI JAKARTA

Menyediakan bantuan pinjaman dana dan bantuan teknis lainya.

Menyediakan anggaran dari APBD DKI Jakarta

## Metode Penelitian

### Tingkat Analisis

Tingkat analisis yang digunakan penulis untuk memudahkan penulis dalam memilah-milah masalah yang paling layak ditekankan atau dianalisis, serta untuk menghindari kemungkinan kesalahan metodologis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tingkat analisa induksionis.

Analisa induksionis merupakan sebuah unit analisa dimana unit eksplanasinya berada pada tingkatan yang lebih tinggi daripada unit analisanya. Dimana disini penulis akan menempatkan variabel bebas yaitu peran dari JICA sebagai NGO sebagai unit analisa yang lebih tinggi dan menempatkan variabel terikat yaitu pengaruhnya terhadap suatu proyek infrastruktur yaitu proyek MRT Jakarta sebagai unit eksplanasi dari variabel bebas.

### Metode Penelitian

Untuk melengkapi penelitian ini agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

Dalam meneliti masalah ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif, dimana metode deskriptif ini adalah metode yang berusaha mengumpulkan, menyusun, menginterpretasikan data yang kemudian diajukan dengan menganalisa data tersebut atau menganalisa fenomena tersebut serta suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemekiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Dalam metode deskriptif dipelajari masalah-masalah yang berlalu dalam masyarakat termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Dengan metode ini dapat diselidiki kedudukannya (status) fenomena atau faktor dan melihat hubungan antara satu faktor dengan faktor lain. selain itu juga menerangkan hubungan, menguji hipotesi-hipotesa, membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang dipecahkan.[[34]](#footnote-34)

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data serta informasi didalam penulisan skripsi ini, penulis mengumpulkan data melalui cara, yakni penelitian kepustakaan (*library research)*, yaitu penelusuran data-data yang bersumber dari bahan-bahan tulisan, baik dari artikel ilmiah, dokumen-dokumen, media massa elektronik dan cetak, dan bahan-bahan tulisan lainnya seperti jurnal yang dapat menjadi pegangan dalam dasar-dasar teori yang berhubungan dengan masalah tersebut.

## Lokasi Dan Lamanya Penelitian

### Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan di beberapa tempat yang dianggap membantu dalam proses penyusunan penelitian ini. Berdasarkan penjelasan tentang lokasi penelitian di atas dan untuk memperoleh data yang diperlukan guna menunjang penelitian ini, penulis memilih beberapa lokasi yang dianggap mampu menyediakan bahan ataupun data yang berguna bagi penelitian ini.

Adapun lokasi penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Perpustakaan Universitas Pasundan.

Jl. Lengkong Besar No.68, Kota Bandung

2. Perpustakaan Universitas Parahyangan.

Jl. Ciumbuleuit No.94, Kota Bandung.

### Lamanya Penelitian

Secaara keseluruhan proses penyusunan penelitian ini memerlukan waktu sejak bulan Nopember 2016 sampai dengan bulan April 2017. Adapun tahapan yang lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kegiatan** | **Tahun** | **2016-2017** |
| **Bulan** | **Desember** | **januari** | **pebruari** | **maret** | **April** |
| **Minggu** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | **TAHAP PERSIAPAN** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Pengajuan judul
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Perizinan
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Penjajagan
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Studi pustaka
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Seminar outline
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TAHAP PELAKSANAAN** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Observasi
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Wawancara
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Pengumpulan data
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TAHAP PELAPORAN** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Pengolahan
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Pembimbingan
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Perbaikan
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Sidang skripsi
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Sistem Matika Penulisan

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan hal-hal yang memuat latar belakang penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka toritis, hipotesis, definisi operasional, metodologi dan teknik pengumpulan data, lokasi dan waktu penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II OBYEK VARIABLE BEBAS**

Dalam bab ini berisi uraian awal mengenai tema atau masalah yang jadikan variable bebas suatu variable yang mempengaruhi atau variable penjelas.

**BAB III OBYEK VARIABLE TERIKAT**

Dalam bab ini penulis memaparkan variable yang dipengaruhi yaitu berisi uraian atau informasi umum atau hal mengenai tema atau masalah yang dijadikan variable terikat.

**BAB IV VERIFIKASI DATA**

Dalam bab ini penulis membahas jawaban terhadap hipotesis dan indikator indikator penelitian (baik indikator variable bebas maupun variable terikat) yang di deskripsikan dalam data, sub judul, dan materi, dalam bab ini berisi uraian data yang meenjawab indikator variable bebas dan variable terikat.

**BAB V KESIMPULAN**

Bab ini berisikan pernyataan akhir dari seluruh proses peneliltian serta pembuktian dari hipoth serta memuat kesimpulan penelitian yang telah diteliti.

1. Ikrar Nusa Bakti, *50 Tahun Indonesia Merdeka* (Pustaka Sinar Baru, 1996) hal. hal 9. [↑](#footnote-ref-1)
2. Dennis Yasutomo, *The Manner or Giving, Strategic Aid and Japanese Foreign Policy* dalam Daulah Khoiriati Djaldan, *Thesis: Japan’s Foreign Aid Policy To Indonesia Its Implication on Japan-Indonesia Relations (*Tokyo: International University of Japan, 1991) hal. 5. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid*, hal. 18. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid*, hal. 40. [↑](#footnote-ref-4)
5. “Japan : Country Profile” United States Departement of States (*Online*), dalam <https://www.state.gov/p/eap/ci/ja/>, diakses 29 November 2016. [↑](#footnote-ref-5)
6. “Official Development Assistance” Ministry of Foreign Affairs of Japan (*Online*), dalam <http://www.mofa.go.jp/policy/oda/summary/1994/1.html>, diakses 2 Desember 2016. [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-7)
8. “Diplomatic Bluebook 2008 (Summary)” Ministry of Foreign Affairs of Japan *(Online)*, dalam <http://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/2008/>, diakses 2 Desember 2016. [↑](#footnote-ref-8)
9. Alan Rix, *Japan’s Economic Aid : Policy Making and Politics* (Croom Helm London, 1980) hal. 49 [↑](#footnote-ref-9)
10. Kimichi Sato and Jap de Wilde, *Japan After Second World War: The Culmination and Foreign Policy*, (London-New York: Palgraff Publishing, 2004) hal. 37-38. [↑](#footnote-ref-10)
11. “About JICA” JICA : Official Website (*Online*), dalam <http://www.jica.go.jp>, diakses 29 Nopember 2016. [↑](#footnote-ref-11)
12. I*bid.* [↑](#footnote-ref-12)
13. I*bid.* [↑](#footnote-ref-13)
14. “JICA in Indonesia” JICA : Official Website *(Online)*, dalam <https://www.jica.go.jp/indonesia/indonesian/>, 18 Oktober 2016. [↑](#footnote-ref-14)
15. Hertanto Soebijoto, “MRT Tahap I Dimulai Tahun Depan” Kompas Internasional (*Online*), dalam <http://internasional.kompas.com/amp/read/2010/09/24/1349236/mrt.tahap.i.dimulai.tahun.depan>, diakses 21 Oktober 2016. [↑](#footnote-ref-15)
16. “Retribusi Lalu Lintas Elektronik; Solusi Efektif Kemacetan Jakarta?” KPBB; Electronic Road Pricing (Online), dalam <http://www.kpbb.org/news/tdm-erp-factsheet-280111-screen.pdf>, diakses 19 Oktober 2016. [↑](#footnote-ref-16)
17. “MRT Jakarta: Increasing Mobility, Improving Life Qualit” Smartcity Jakarta (*Online*), dalam <http://smartcity.jakarta.go.id/blog/46/mrt-increasing-mobility-improving-life-quality>*,* diakses 19 Oktober 2016 [↑](#footnote-ref-17)
18. Edie Haryoto, *Transportasi Pro Rakyat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013) [↑](#footnote-ref-18)
19. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-19)
20. Teuku May Rudy, 2002, Hukum Internasional 2, Bandung: Refika Aditama, hal. 93. [↑](#footnote-ref-20)
21. Teuku May Rudy, 2009, Teori, Etika dan Kebijakan Hubungan Internasional, Bandung: Angkasa, hal. 2-3. [↑](#footnote-ref-21)
22. Teuku May Rudy, 2002, Op.Cit., hal, 5. [↑](#footnote-ref-22)
23. About JICA Organization diakses melalui http://www.jica.go.jp/english/about/organization/index.html pada 6 Desember 2013. [↑](#footnote-ref-23)
24. Anthony Giddens, *Society and New Civilization*, (New Haven: Yale University Press, 1998), hal.29. [↑](#footnote-ref-24)
25. Mochtar Mas‟oed, 2008, Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan,Yogyakarta: Pustaka Pelajar. [↑](#footnote-ref-25)
26. Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani, 2005, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Bandung: Remaja Rosdakarya, hal. 83. [↑](#footnote-ref-26)
27. Hans J Morgenthau, *A Political Foreign Aid*, (New York: The American Political Science Review Journal, 1962) hal. 3012. [↑](#footnote-ref-27)
28. George Sorensen, *The Transformation of the State: Beyond The Myth of Retreat*, (Hampshire and New York: Palgrave Mc Millan Publishing, 2004) hal.17. [↑](#footnote-ref-28)
29. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-29)
30. Alan Rix, 1993, Japan’s Foreign Aid Challenge Policy Reform and Aid Leadership, London and New York: Routledge, hal. 18-19. [↑](#footnote-ref-30)
31. Thomas Oatley, International Political Economy: Interest & Institution in The Global Economy, Person Education Institute, Pearson-Longman, 2006, hal.11. [↑](#footnote-ref-31)
32. John E Carroll and Rachel Sarson, International Environmnt Diplomacy: The Management and Resolution After Conflict: Third Editions, University of Cambridge, Cambridge, 2002, hal.51. [↑](#footnote-ref-32)
33. Mancur Olson, The Logic of Collective Action: A Public Goods and The Theory of Group: 12th Printed, Harvard University Press, 2002, hal.37. [↑](#footnote-ref-33)
34. Muhammad Nazir, Metode Penelitian, Jakarta, Ghalla Indonesia, 1998, Hal. Bab II [↑](#footnote-ref-34)